



## APAKAH BELANJA PEMERINTAH PUSAT BERSINERGI DENGAN BELANJA DAERAH? STUDI KASUS: KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

*Does Central Expenditure Spent in Local Synergize with Local Expenditure? Case Study: Regencies/Cities in Indonesia*

Resti Astuti<sup>1</sup> & Khoirunurrofik<sup>1</sup>

### Info Artikel

<sup>1</sup>MPKP FEB UI, Jakarta,  
restimonial@gmail.com

Riwayat Artikel :  
Diterima 05-04-2022  
Direvisi 14-06-2022  
Disetujui 23-06-2022  
Tersedia online 27-06-2022

**JEL Classification :** H61, H72

### Abstract

*Indonesia has been implementing decentralization policy for two decades. The amount of Transfer of Fund to Local and Rural (TKDD) as decentralization instrument increases rapidly and encourages local expenditure growth. Some studies had identified determinants of local expenditure in Indonesia, such as local own-source revenue (PAD), fund transfer, and population. However, existing studies did not include central expenditure yet in estimating local expenditure to examine correlation between central and local expenditure. In this study, we are interested to examine not only the effect of determinants such as PAD, fund transfer, and population on local expenditure, but also the correlation between central expenditure spent in local and local expenditure. Using panel data of regencies/cities in Indonesia for 2010-2019 period and fixed effect model (FEM) methodology, the result shows that central expenditure spent in local and local expenditure has positive correlation. The synergy between central and local expenditure can be found from the positive correlation between central and local expenditure, furthermore central expenditure spent in local can be a stimulus to increase local expenditure.*

**Keywords :** central expenditure, decentralization, local expenditure

### Abstrak

Indonesia telah menerapkan desentralisasi selama dua dekade. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai *instrument* desentralisasi mengalami peningkatan yang sangat tinggi sehingga mendorong peningkatan belanja daerah. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah di Indonesia, antara lain PAD, dana perimbangan dan populasi. Namun, belum ada penelitian yang memasukkan faktor belanja pemerintah pusat dalam estimasi belanja daerah untuk melihat hubungan antara belanja pemerintah pusat dan daerah. Pada penelitian ini, penulis tidak hanya ingin menguji pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah seperti PAD, dana perimbangan dan populasi namun juga tertarik untuk menguji hubungan antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah untuk melihat apakah belanja pemerintah pusat di daerah dapat menstimulus belanja daerah. Dengan menggunakan data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk periode 2010-2019 dan metode *fixed effect model* (FEM), hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah pusat di daerah berkorelasi positif dengan belanja daerah di

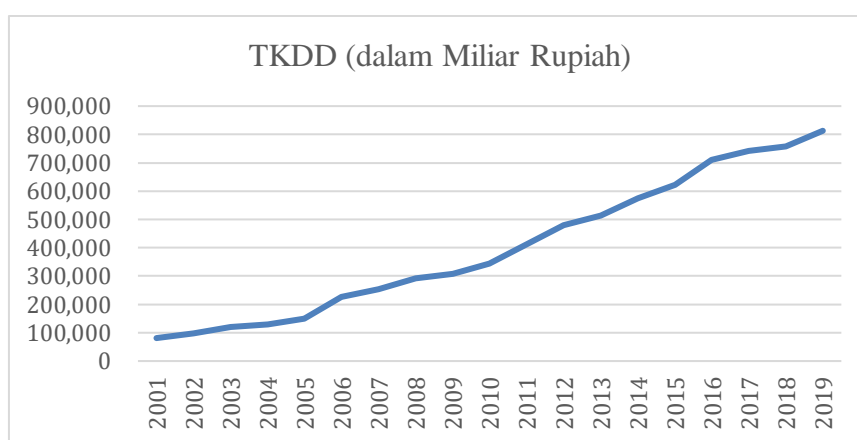
Indonesia. Artinya, sinergi antara belanja pemerintah pusat dan belanja daerah dapat dilihat melalui korelasi positif antara belanja pusat dan daerah, dimana belanja pemerintah pusat di daerah dapat menjadi *stimulus* dalam meningkatkan belanja daerah.

**Kata kunci:** belanja daerah, belanja pemerintah pusat, desentralisasi

## 1. PENDAHULUAN

Semangat reformasi yang bangkit di tahun 1998 menjadi salah satu pemicu perubahan sistem yang diterapkan di Indonesia yaitu dari sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Perubahan yang dialami Indonesia dalam menerapkan desentralisasi yang besar dan cepat ini terjadi secara “big bang” (Hofman dan Kaiser, 2002).

Sejak efektif dilaksanakan tahun 2001 melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia telah berlangsung selama dua dekade. Cakupan sistem desentralisasi menjadi lebih luas yaitu pada tahun 2014 Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih seimbang dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi, yaitu dengan adanya formulasi terkait kewenangan desa yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia tidak hanya berupa transfer namun menjadi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Grafik di bawah ini akan menunjukkan perkembangan TKDD tahun 2001 hingga tahun 2019.

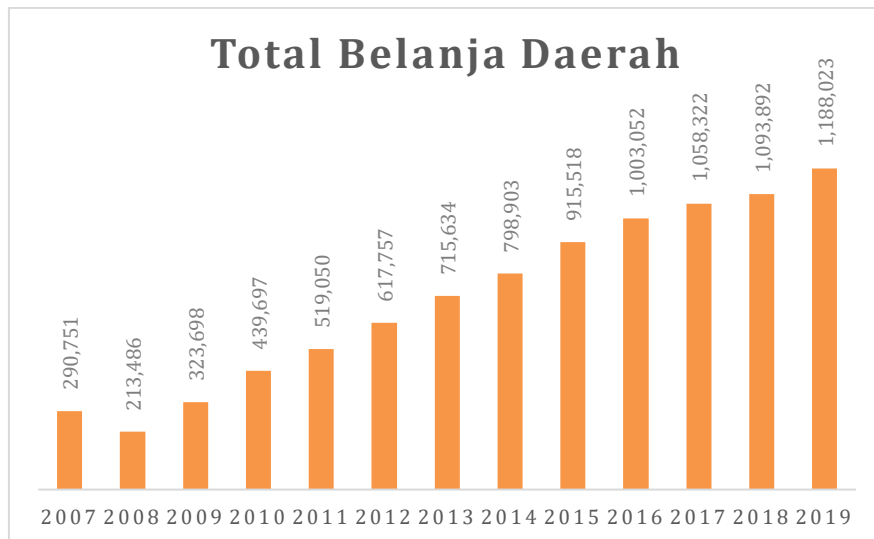


**Gambar 1. Perkembangan TKDD Tahun 2001-2019**

Berdasarkan grafik di atas, dana untuk menerapkan desentralisasi fiskal dalam bentuk TKDD meningkat dengan pesat sejak masa awal penerapan desentralisasi fiskal. Dana TKDD meningkat secara signifikan hingga 10 kali dari besaran TKDD di tahun awal penerapan desentralisasi seiring dengan peningkatan postur APBN secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan total belanja negara, proporsi TKDD terhadap total belanja pemerintah juga cenderung mengalami peningkatan yaitu sekitar 24% dari total belanja di tahun 2001 dan mencapai 35% dari total belanja negara di tahun 2019.

Transfer ke daerah yang berkembang pesat tersebut kemudian menjadi salah satu faktor dalam membentuk belanja daerah (Abdillah dan Mursinto, 2016;Wati dan Fajar, 2017;Fatimah et al., 2020;Aziza dan Sumardjo, 2020;Makorimban et al., 2020). Dengan penerapan

desentralisasi, belanja daerah juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Adapun perkembangan belanja daerah selama tahun 2007 hingga 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 2. Perkembangan Total Belanja Daerah (dalam Miliar Rupiah)**

Berdasarkan Gambar 2, total belanja daerah mengalami peningkatan yang pesat, yaitu sekitar Rp 290,7 triliun di tahun 2007 cenderung terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 1.188 triliun di tahun 2019 atau tumbuh sekitar 13,92% per tahun. Kenaikan belanja daerah tersebut dapat diestimasi dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belanja daerah. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya terkait belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH), dan populasi merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belanja daerah.

Penelitian Abdillah dan Mursinto (2016) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan seperti DAU dan DAK secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Selanjutnya penelitian Wati dan Fajar (2017) menggunakan data kabupaten/kota di Sulawesi juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Selain itu, Aziza dan Sumardjo (2020) yang melakukan penelitian sejenis untuk kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa tidak hanya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, namun jumlah penduduk juga berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada dan mengestimasi belanja daerah untuk provinsi atau wilayah tertentu, belum terdapat penelitian yang menguji korelasi belanja pemerintah pusat dan daerah serta menggunakan data seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga pada penelitian ini, penulis tertarik untuk menguji bagaimana pengaruh faktor-faktor seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah serta memasukkan faktor belanja pemerintah pusat dalam model penelitian menggunakan data seluruh kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2010-2019. Penelitian dibangun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan analisis deskriptif mengenai perkembangan belanja pemerintah di daerah baik berupa belanja pemerintah pusat maupun belanja pemerintah daerah.

- b. Menguji pengaruh faktor-faktor seperti PAD, dana perimbangan atau transfer dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah serta korelasi belanja pemerintah pusat di daerah dengan belanja daerah.
- c. Menguji korelasi antara belanja pemerintah pusat dan belanja daerah berdasarkan fungsi.

Tujuan penelitian di atas akan menjawab pertanyaan penelitian sekaligus judul penelitian ini yaitu: Apakah belanja pemerintah pusat telah bersinergi dengan belanja daerah? Dengan menganalisis korelasi dari kedua belanja tersebut, penulis ingin mengetahui apakah telah terjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui alokasi belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah. Sinergi sendiri didefinisikan sebagai suatu efek yang dapat menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dari kombinasi berbagai sumber daya organisasi (Ansoff, 1968), makin relevan dan signifikan permasalahan yang menjadi fokus dalam hubungan kerjasama itu, sinergi yang dihasilkan akan lebih bermakna bagi kepentingan organisasi (Convey, 1989). Sehingga korelasi antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah dapat mencerminkan sinergi dari program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah di kabupaten/kota.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### a. *Principal-Agent Theory*

Teori ini mempelajari mengenai hubungan sosial yang secara khusus melibatkan delegasi pada dua aktor yang terlibat dalam pelimpahan sumber daya. *Principal* merupakan aktor yang memberikan sejumlah sumber daya tertentu, sedangkan *agent* merupakan aktor menerima sumber daya tersebut untuk kemudian dikelola lebih lanjut agar mencapai tujuan dari *principle* (Braun dan Guston, 2003). Karakteristik dari *principle-agent theory* adalah asumsi bahwa masing-masing aktor akan berusaha untuk mendahulukan prioritasnya berdasarkan kepentingan masing-masing sehingga kelembagaan atau institusi diperlukan untuk dapat membatasi masing-masing aktor dari tindakan yang menyebabkan permasalahan kolektif seperti *moral hazard* dan *adverse selection* dengan mengikat para aktor dalam kontrak (Williamson, 2002).

Menurut Leruth dan Paul (2007) dalam keuangan publik, elemen penting dari *principle-agent model* adalah menentukan apa yang menjadi elemen poin utama dalam kontrak, Menteri Keuangan sebagai *principle* yang melimpahkan sumber daya berupa alokasi dana, sedangkan *agent* merupakan pihak atau kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang menerima dana tersebut sehingga kinerja menjadi salah satu elemen penting yang harus diperhatikan dalam kontrak.

Lebih lanjut Leruth dan Paul (2007) menegaskan bahwa sejumlah operasional pemerintah dapat dikaitkan dengan hubungan *principle-agent*, misalnya Menteri Keuangan sebagai *principle* dan Menteri/Kepala Lembaga lainnya sebagai *agent* yang menerima sumber daya dan harus memenuhi kinerja/output tertentu. Di sisi lain, Menteri/Kepala Lembaga dapat berperan sebagai *principle* yang memastikan bahwa seluruh pejabat hingga staf di bawahnya sebagai *agent* mengimplementasikan program/kegiatan yang telah diamanatkan. Parlemen atau legislatif juga dapat berperan sebagai *principle* yang bertugas untuk memastikan bahwa pemerintah atau eksekutif menjalankan program yang telah ditetapkan.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat dikaitkan dengan hubungan *principle-agent*, dimana pemerintah pusat sebagai *principle* memberikan transfer sehingga pemerintah daerah sebagai *agent* dapat mengimplementasikan program-program nasional dan

membangun daerahnya (Ahmad, Tandberg, & Zhang, 2002). Hubungan ini juga dapat menjelaskan bagaimana seharusnya belanja pemerintah pusat yang berasal dari APBN (*Principle*) dapat menjadi stimulus bagi daerah untuk mengalokasikan belanja daerahnya (*Agent*). Selain itu, dana perimbangan yang juga berasal dari pemerintah pusat dan pengaturan oleh pemerintah pusat terkait potensi dan peningkatan pendapatan asli daerah dapat menjadi sumber daya untuk mengalokasikan belanja daerah.

b. Desentralisasi

Penerapan desentralisasi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu *instrument* dalam sistem desentralisasi di Indonesia adalah Transfer ke Daerah (TKD). Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, TKD terdiri dari:

- DBH
- DAU
- DAK
- Dana Otonomi Khusus
- Dana Keistimewaan
- Dana Desa

Transfer ke daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri kemudian membentuk belanja daerah. Sedangkan belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

c. Studi Empiris

Perkembangan belanja daerah di Indonesia yang merupakan bagian dari penerapan desentralisasi telah banyak dianalisis, khususnya dengan menggunakan *instrument* desentralisasi seperti dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH. Terdapat beberapa penelitian di Indonesia yang menguji pengaruh dari faktor-faktor determinan terhadap belanja daerah. Laksono dan Subowo (2014) menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan menemukan bahwa pajak daerah, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Abdillah dan Mursinto (2016) menguji pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, menemukan bahwa baik PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sejalan dengan penelitian tersebut, Armawaddin et al. (2017) yang menggunakan data Kabupaten/Kota di Sulawesi serta Ansori dan Muthmainah (2018) yang menggunakan data Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusa Tenggara juga menemukan bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Fatimah et al. (2020) menemukan hanya PAD dan DAU yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berbeda dengan Aziza & Sumardjo (2020) yang juga menggunakan data kabupaten/kota di Jawa Timur dengan menambahkan variabel jumlah penduduk menemukan bahwa DAK tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah sedangkan variabel lain seperti PAD, DAU dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan

signifikan. Selanjutnya penelitian Makorimban et al. (2020) menunjukkan hanya PAD yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

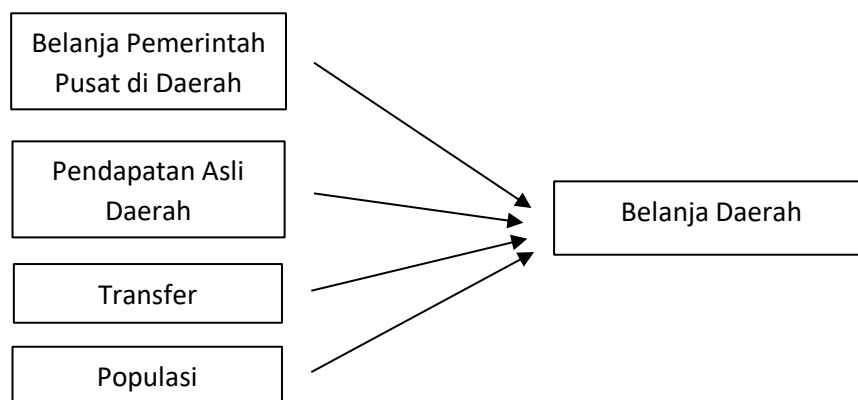
Penelitian lain menguji pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja daerah dan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan dari kedua variabel tersebut Wati dan Fajar (2017). Sedangkan Ramadhan et al. (2021) dengan menambahkan variabel jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM) dan PDRB menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

### 3. METODE PENELITIAN

Estimasi untuk data panel dilakukan dengan menggunakan *fixed effect model* (FEM) karena data panel yang digunakan yaitu data kabupaten/kota selama tahun 2010 hingga 2019 memperhatikan heterogenitas unit *cross-section* pada model regresi data panel artinya masing-masing kabupaten/kota dalam penelitian memiliki karakteristik masing-masing sehingga kumpulan *error* masing-masing objek penelitian tidak dapat dikorelasikan satu sama lain.

Penelitian ini tidak memasukkan data keuangan untuk pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia dan kota administrasi di Jakarta karena perbedaan karakteristik yang sangat berbeda dari data tersebut. Data diperoleh dari 505 kabupaten/kota yang sudah terbentuk sepanjang tahun 2010 hingga 2019 di seluruh Indonesia. Data panel yang digunakan bersifat *unbalance*, yaitu unit *cross-sectional* memiliki jumlah observasi *time series* yang tidak sama karena terdapat beberapa kekosongan data untuk kabupaten/kota pada variabel dan tahun tertentu.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah belanja daerah, sedangkan variabel independen utama adalah belanja pemerintah pusat di daerah. Selain itu juga digunakan variabel kontrol yang merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen, antara lain pendapatan asli daerah (PAD), transfer atau dana perimbangan dan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol.



**Gambar 3. Kerangka Penelitian**

a. Belanja Daerah ( $BD_{it}$ )

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Belanja Pemerintah Pusat di Daerah ( $BP_{it}$ )

Pada penelitian ini juga akan dianalisis pengaruh dari belanja pemerintah pusat di daerah yaitu seluruh belanja pemerintah pusat pada Kementerian/Lembaga yang berasal dari APBN berdasarkan lokasi yaitu kabupaten/kota selama tahun 2010 hingga 2019.

c. Variabel Kontrol

Pada penelitian ini akan digunakan beberapa variabel kontrol yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya terkait belanja daerah, antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah ( $PAD_{it}$ )

PAD merupakan salah satu variabel kontrol yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Variabel PAD digunakan dalam beberapa penelitian yang menganalisis belanja daerah, antara lain penelitian Abdillah dan Mursinto (2016), Armawaddin et al. (2017), Ansori dan Muthmainah (2018), Fatimah et al. (2020), Aziza & Sumardjo (2020), Makorimban et al. (2020), Wati dan Fajar (2017) dan Ramadhan et al. (2021).

2) Dana Perimbangan ( $Transfer_{it}$ )

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Variabel dana perimbangan atau transfer juga digunakan pada penelitian Armawaddin et al. (2017) dan Ramadhan et al. (2021).

3) Populasi ( $Populasi_{it}$ )

Populasi merupakan variabel yang menggambarkan kondisi demografi kabupaten/kota, variabel jumlah penduduk digunakan sebagai variabel kontrol mengacu pada beberapa penelitian tentang belanja daerah seperti Aziza dan Sumardjo (2020) serta Ramadhan et al. (2021).

Seluruh variabel diestimasi menggunakan nilai logaritma agar data penelitian dapat terdistribusi dengan normal meskipun memiliki perbedaan angka satuan (Fatimah et al., 2020). Dengan mentransformasi data menjadi bentuk logaritma juga sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan heterokedastisitas dan mengatasi fluktuasi data yang terlalu tinggi. Selanjutnya untuk variabel belanja daerah, belanja pemerintah pusat di daerah, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (transfer) diukur menggunakan nilai konstannya untuk menghindari pengaruh dari inflasi pada nilai riil setiap tahun.

Berdasarkan variabel-variabel yang telah diuraikan di atas, maka model estimasi yang dibangun untuk menguji hubungan antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah mengacu pada model penelitian Gennari dan Messina (2009), Fatimah et al. (2020) dan Aziza dan Sumardjo (2020) adalah sebagai berikut:

$$\log BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log BP_{it} + \beta_2 \log PAD_{it} + \beta_3 \log Transfer_{it} + \beta_4 \log Populasi_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

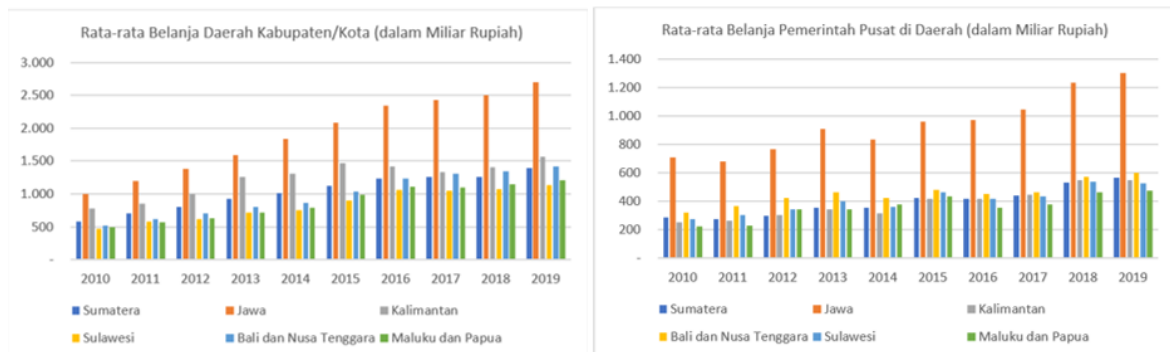
BD : belanja daerah

BP	: belanja pemerintah pusat di daerah
PAD	: pendapatan asli daerah
Transfer	: dana perimbangan
Populasi	: jumlah penduduk
$i$	: unit <i>cross-section</i> kabupaten/kota di Indonesia
$t$	: <i>time series</i> (2010, ..., 2019)
$\beta_0$	: intersep
$\alpha_i$	: komponen <i>fixed effect</i>
$\beta_{1-4}$	: parameter koefisien
$\varepsilon_{it}$	: <i>error term</i>

#### 4. PEMBAHASAN

##### a. Perkembangan Belanja Desentralisasi dan Belanja Pemerintah Pusat di Daerah

Berdasarkan data kabupaten/kota yang digunakan pada penelitian ini, belanja daerah dan belanja pemerintah pusat di daerah cenderung meningkat setiap tahunnya, baik secara rata-rata per wilayah maupun untuk masing-masing kabupaten/kota. Berikut ini akan ditampilkan rata-rata belanja daerah dan belanja pemerintah pusat di daerah seluruh kabupaten/kota yang terbagi berdasarkan wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua.

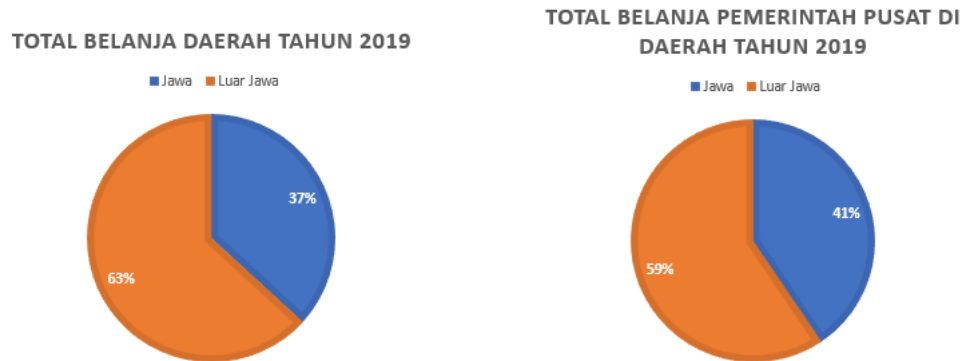


**Gambar 4. Rata-rata Belanja Daerah dan Belanja Pemerintah Pusat di Daerah per Wilayah di Indonesia**

Grafik tersebut menunjukkan bahwa rata-rata belanja daerah kabupaten/kota per wilayah cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Belanja daerah di kabupaten/kota di Jawa mengalami kenaikan yang cukup stabil setiap tahun dan memiliki rata-rata belanja daerah yang tertinggi, diikuti dengan Kalimantan, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua serta Sulawesi. Kabupaten/kota di Sulawesi sejak tahun 2010 hingga 2019 memiliki rata-rata belanja daerah terkecil diantara wilayah lain dengan rata-rata belanja daerah untuk setiap kabupaten/kota kurang dari setengah rata-rata belanja daerah di kabupaten/kota di Jawa. Sama halnya dengan rata-rata belanja daerah, rata-rata belanja pemerintah pusat di kabupaten/kota di Jawa juga memiliki nilai tertinggi, sedangkan rata-rata belanja pemerintah pusat di kabupaten/kota luar Jawa kurang dari setengah rata-rata belanja pemerintah pusat di kabupaten/kota di Jawa. Wilayah selain Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi serta Maluku dan Papua memiliki rata-rata belanja pemerintah pusat di daerah dan pertumbuhan yang hampir sama besar setiap tahunnya.



Selanjutnya akan ditampilkan komposisi belanja daerah dan belanja pemerintah pusat di daerah untuk Jawa dan luar Jawa pada grafik di bawah ini:



**Gambar 5. Total Belanja Daerah dan Belanja Pemerintah Pusat di daerah tahun 2019 untuk Jawa dan luar Jawa**

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2019 total belanja daerah luar Jawa adalah sekitar 63% dari total belanja daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan untuk wilayah Jawa sendiri berjumlah 37% dari total daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia meskipun jumlah kabupaten/kota di Jawa lebih sedikit daripada jumlah kabupaten/kota di luar Jawa. Grafik total belanja pemerintah pusat di daerah tahun 2019 juga menunjukkan bahwa total belanja pemerintah pusat di kabupaten/kota di luar Jawa adalah sekitar 59% dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia sedangkan total belanja pemerintah pusat di daerah untuk kabupaten/kota di Jawa mencapai 41% dari total secara keseluruhan.

- b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk dan Belanja Pemerintah Pusat di Daerah terhadap Belanja Daerah

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

Variabel	Obs	Mean	Min	Max	Std. Dev.	Coef. Var
BD	4977	950.552,55	93.803,633	7.845.369,5	635.505,32	0,669
BP	4954	522.236	305,321	17.174.250	1.242.267,7	2,379
PAD	4979	122.768,15	354,455	3.809.408,5	246.854,43	2,011
Transfer	4979	798.322,86	57.995,602	5.235.722,5	434.771,32	0,545
Populasi	4963	488.552	6.144	5934.116	590.659	1,209

Pada tabel statistik deskriptif, jumlah observasi yang berbeda menunjukkan bahwa data yang digunakan bersifat *unbalanced*. Nilai konstan belanja daerah memiliki rata-rata Rp 950.552.550.000 yang artinya rata-rata kabupaten/kota memiliki belanja daerah sebesar Rp 950.552.550.000. Terdapat kabupaten/kota yang hanya memiliki belanja daerah sebesar Rp 93.803.633.000 yaitu Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2014 dan terdapat kabupaten/kota yang memiliki belanja daerah sebesar Rp 7.845.369.500.000 yaitu Kabupaten Berau tahun 2015. *Coefficient of variance* yang bernilai 0,669 atau < 1 mencerminkan variasi/fluktuasi yang rendah dari nilai konstan belanja daerah kabupaten/kota.

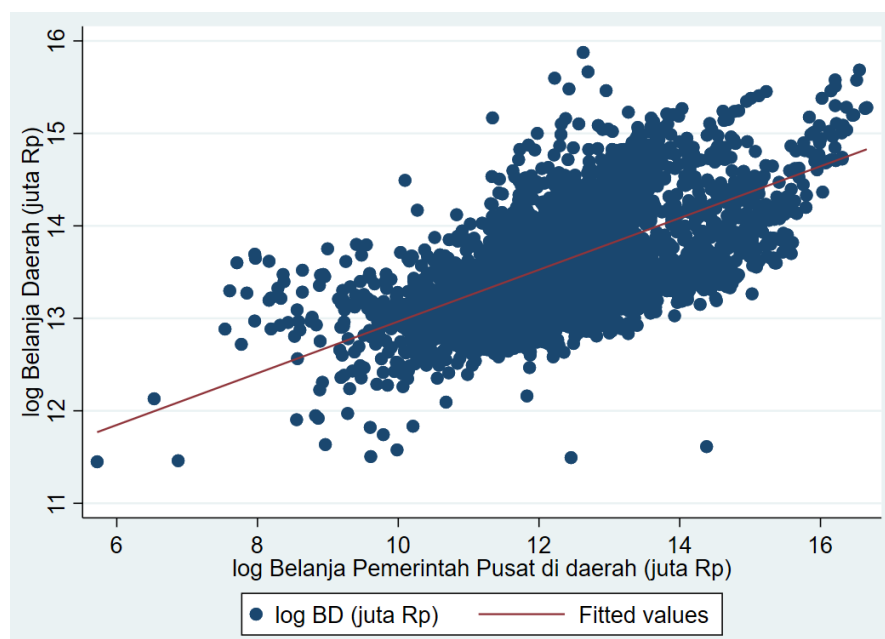
Rata-rata belanja pemerintah pusat di daerah adalah sekitar Rp 418 miliar. Belanja pemerintah pusat di kabupaten/kota yang paling kecil adalah sebesar Rp 19 juta di Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2019. Sedangkan belanja pemerintah pusat di kabupaten/kota yang

tertinggi adalah sebesar Rp 12,1 triliun yaitu di Kota Bandung tahun 2010. *Coefficient of variance* yang bernilai 2,379 atau  $> 1$  mencerminkan variasi/fluktuasi yang tinggi dari nilai konstan belanja pemerintah pusat di kabupaten/kota.

Kabupaten/kota memperoleh rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 122.768.150.000. Terdapat kabupaten/kota yang hanya dapat menghasilkan PAD sebesar Rp 354.455.000 yaitu kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2014. Sedangkan kota Surabaya tahun 2019 merupakan kabupaten/kota yang menghasilkan PAD tertinggi yaitu Rp 3.809.408.500.000. *Coefficient of variance* yang bernilai 2,011 atau  $> 1$  menunjukkan bahwa data PAD kabupaten/kota memiliki variasi/fluktuasi yang cukup tinggi.

Rata-rata transfer yang diterima kabupaten/kota selama tahun 2010-2019 adalah sebesar Rp 798.322.860.000 dengan nilai terendah yaitu sebesar Rp 57.995.602.000 yang diterima oleh kota Gunung Sitoli tahun 2011 dan tertinggi yaitu sebesar Rp 5.235.722.5000.000 yang diterima oleh kabupaten Berau tahun 2015. *Coefficient of variance* yang bernilai 0,545 atau  $< 1$  menunjukkan bahwa variasi/fluktuasi dari transfer yang diterima kabupaten/kota cukup rendah.

Kabupaten/kota pada penelitian memiliki rata-rata jumlah penduduk sebanyak 488.552 orang. Kabupaten dengan jumlah penduduk terendah adalah kabupaten Tambrawa di tahun 2010 yaitu sekitar 6.144 orang sedangkan kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sekitar 5.934.116 di tahun 2019. Data jumlah penduduk memiliki *coefficient of variance* sebesar 1,209 atau  $> 1$  yang menunjukkan bahwa variasi/fluktuasi jumlah penduduk di kabupaten/kota cukup tinggi.



**Gambar 6. Scatter Plot Belanja Pemerintah Pusat di Daerah dan Belanja Daerah**

*Scatter plot* di atas menunjukkan gambaran awal berupa pola hubungan yang positif antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah. Untuk menguji hubungan antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah lebih lanjut dilakukan analisis ekonometrika menggunakan aplikasi STATA versi 16 dengan metode *fixed effect model* (FEM) dengan data kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2010 hingga 2019. Dalam mengatasi

permasalahan heterokedastisitas pada model maka analisis dengan metode FEM dilakukan dengan menambahkan *robust standard error*. Regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Regresi Belanja Pemerintah Pusat di Daerah terhadap Belanja Daerah dengan Robust Standard Error**

	Model 1	Model 2	Model 3
log Belanja Pusat	0.0141** (0.00671)		
log Belanja Pusat <sub>(t-1)</sub>		0.00546 (0.00345)	
log Belanja Pusat <sub>(t-2)</sub>			0.00573* (0.00297)
log PAD	0.147*** (0.00901)	0.147*** (0.00948)	0.146*** (0.00898)
log Transfer	0.765*** (0.0318)	0.774*** (0.0324)	0.776*** (0.0310)
log Populasi	0.171*** (0.0380)	0.187*** (0.0405)	0.196*** (0.0418)
Constant	0.550 (0.350)	0.445 (0.373)	0.364 (0.339)
Observations	4936	4931	4916
Adjusted R <sup>2</sup>	0.856	0.856	0.850

Standard errors in parentheses

\*  $p < 0.10$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*\*\*  $p < 0.01$

Tabel 2 menunjukkan hasil regresi pada 3 model penelitian yang berbeda untuk melihat perbedaan pengaruh belanja pemerintah pusat pada tahun berjalan, satu tahun berikutnya dan 2 tahun berikutnya. Model pertama menguji belanja pemerintah pusat di daerah pada tahun berjalan terhadap belanja daerah, model kedua menguji pengaruh belanja pemerintah pusat di daerah terhadap belanja daerah untuk tahun berikutnya dan model ketiga menguji pengaruh belanja pemerintah pusat di daerah terhadap belanja daerah setelah 2 tahun.

Berdasarkan hasil regresi di atas, belanja pemerintah pusat di daerah memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dengan adanya stimulus dari pemerintah pusat melalui belanja pemerintah pusat di daerah maka pemerintah daerah merespon dengan meningkatkan belanja daerah untuk melengkapi program atau pembangunan yang telah lebih dulu dimulai oleh pemerintah pusat. Koefisien regresi yang menunjukkan hubungan yang positif tersebut juga memberikan indikasi bahwa ketika pemerintah pusat meningkatkan belanja pemerintah pusat di kabupaten/kota tertentu sebanyak 1% maka pemerintah daerah di kabupaten/kota tersebut cenderung untuk meningkatkan belanja daerahnya sebanyak 0,0141%.

Selain belanja pemerintah pusat di daerah, variabel kontrol seperti pendapatan asli daerah (PAD), transfer yang diterima daerah dan jumlah penduduk juga berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Arah pengaruh yang positif dari variabel PAD, transfer dan jumlah penduduk sesuai dengan hasil penelitian terkait yaitu Abdillah & Mursinto (2016), Wati dan Fajar (2017), Ansori dan Muthmainah (2018), Aziza dan Sumardjo (2020), Fatimah et al. (2020), dan Ramadhan et al. (2021) yang juga menunjukkan hasil analisis bahwa PAD, transfer dan populasi berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Selaras dengan penelitian Abdillah & Mursinto (2016), Wati dan Fajar (2017), Ansori dan Muthmainah (2018), Aziza dan Sumardjo (2020), Fatimah et al. (2020), dan Ramadhan et al. (2021), semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula belanja daerah tersebut karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang membentuk belanja daerah. Koefisien regresi untuk variabel PAD sebesar 0,147 pada Model 1 dapat diinterpretasikan sebagai kenaikan belanja daerah sebesar 0,147% untuk setiap 1% kenaikan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di Indonesia.

Regresi untuk variabel transfer juga menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian Armawaddin et al. (2017) dan Ramadhan et al. (2021). Transfer juga merupakan salah satu faktor yang membentuk belanja daerah sehingga semakin tinggi transfer yang diterima suatu daerah maka belanja daerahnya semakin besar. Koefisien regresi untuk transfer sebesar 0,765 pada Model 1 menunjukkan bahwa pengaruh transfer dari pemerintah pusat masih memberikan pengaruh yang lebih besar daripada pendapatan asli daerah kabupaten/kota dalam membentuk belanja daerahnya yaitu untuk setiap kenaikan 1% transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja daerah sebesar 0,765%.

Pengaruh positif dari variabel populasi terhadap belanja daerah mencerminkan bahwa semakin besar jumlah penduduk kabupaten/kota maka belanja daerah di kabupaten/kota tersebut akan semakin tinggi. Jumlah penduduk yang tinggi akan membutuhkan biaya pelayanan, sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pengaruh positif tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Aziza dan Sumardjo (2020) serta Ramadhan et al. (2021). Kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1% di kabupaten/kota dapat meningkatkan belanja daerah kabupaten/kota tersebut sebanyak 0,171%.

Pada pembahasan sebelumnya di poin 4.a ditemukan bahwa rata-rata belanja pemerintah baik berupa belanja pemerintah pusat maupun belanja daerah di kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata belanja pemerintah pusat dan belanja daerah di kabupaten/kota luar Jawa. Selanjutnya model penelitian diuji lebih dengan membagi data penelitian pada 2 cluster yaitu wilayah Jawa dan luar Jawa untuk melihat pengaruh dari faktor-faktor determinan pada kedua wilayah yang berbeda.

**Tabel 3. Regresi Belanja Pemerintah Pusat di Daerah terhadap Belanja Daerah untuk Wilayah Jawa dan luar Jawa dengan *Robust Standard Error***

	Jawa	Luar Jawa
log Belanja Pusat	0.0510*** (0.0164)	0.00296 (0.00608)
log Pendapatan Asli Daerah	0.214*** (0.0156)	0.133*** (0.00947)
log Transfer	0.547*** (0.0417)	0.783*** (0.0347)
log Jumlah Penduduk	0.783*** (0.172)	0.162*** (0.0363)
Constant	-7.517*** (2.321)	-0.410 (0.487)
Observations	1126	3810
Adjusted $R^2$	0.909	0.849

Standard errors in parentheses, \*  $p < 0.10$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*\*\*  $p < 0.01$

Berdasarkan hasil regresi yang dibedakan berdasarkan wilayah Jawa dan luar Jawa, variabel kontrol yaitu pendapatan asli daerah, transfer dan jumlah penduduk menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah untuk wilayah Jawa dan luar Jawa. Artinya pendapatan asli daerah, transfer dan jumlah penduduk secara konsisten terbukti berpengaruh positif terhadap belanja daerah berlaku untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia baik yang berada di wilayah Jawa dan luar Jawa.

Koefisien regresi pada tabel 3 menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap kenaikan belanja daerah lebih besar di wilayah Jawa daripada luar Jawa. Hal ini dapat disebabkan karena potensi pendapatan daerah yang cenderung lebih besar karena aktivitas perekonomian yang lebih tinggi di wilayah Jawa dibandingkan luar Jawa sehingga pendapatan asli daerah di wilayah Jawa berpengaruh lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan di luar Jawa. Kepadatan penduduk di kabupaten/kota wilayah Jawa menyebabkan pengaruh dari jumlah penduduk terhadap alokasi belanja daerah menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di luar Jawa yang cenderung memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dari wilayah Jawa.

Sedangkan pengaruh transfer terhadap belanja daerah justru lebih besar untuk wilayah luar Jawa dibandingkan Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di luar Jawa berpengaruh lebih besar dalam meningkatkan belanja daerah kabupaten/kota tersebut relatif daripada kabupaten/kota di Jawa.

Variabel independent utama yaitu belanja pemerintah pusat di daerah menunjukkan hasil yang sedikit berbeda ketika diuji pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan pada model yang dibedakan berdasarkan cluster Jawa dan luar Jawa. Tabel 3 menunjukkan bahwa belanja pemerintah pusat di daerah memiliki arah pengaruh yang positif terhadap belanja daerah baik untuk kabupaten/kota yang ada di Jawa dan luar Jawa namun pengaruhnya untuk kabupaten/kota di luar Jawa tidak signifikan. Artinya bahwa secara keseluruhan belanja pemerintah pusat di daerah berkorelasi positif dengan belanja daerah namun korelasi tersebut untuk luar Jawa tidak cukup signifikan. Namun demikian korelasi positif tersebut masih sangat signifikan terlihat untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

c. Korelasi Belanja Pemerintah Pusat di Daerah dan Belanja Daerah berdasarkan Fungsi

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan menguji hubungan belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah berdasarkan beberapa fungsi yaitu fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum serta pendidikan menggunakan model penelitian yang sama dengan analisis sebelumnya pada Tabel 3. Adapun beberapa fungsi yang lain seperti fungsi pertahanan dan agama hanya ada pada belanja pemerintah pusat sehingga tidak dapat dikorelasikan dengan fungsi yang sama pada belanja daerah sedangkan data belanja fungsi kesehatan dan pariwisata untuk beberapa kabupaten/kota pada beberapa tahun tertentu tidak lengkap sehingga tidak dapat dianalisis lebih lanjut.

**Tabel 4. Hasil Regresi Hubungan Belanja Pusat dan Daerah per Fungsi (dengan *robust standard error*)**

Fungsi	Pelayanan	Ketertiban	Ekonomi	Lingkungan	Perumahan	Pendidikan
Pelayanan	0.0589*** (0.00945)					
Ketertiban		-0.0200 (0.0133)				
Ekonomi			0.0169** (0.00700)			
Lingkungan				-0.0582*** (0.0133)		
Perumahan					0.0147* (0.00820)	
Pendidikan						0.0163 (0.0113)
PAD	0.208*** (0.0182)	0.228*** (0.0284)	0.0504*** (0.0193)	0.172*** (0.0387)	0.212*** (0.0221)	0.0431** (0.0186)
Transfer	0.650*** (0.0526)	0.497*** (0.0760)	0.444*** (0.0639)	0.744*** (0.0841)	0.902*** (0.0740)	0.293*** (0.0776)
Populasi	0.314*** (0.109)	0.440** (0.174)	-0.191 (0.129)	-0.325 (0.212)	-0.187 (0.132)	0.355*** (0.118)
Constant	-3.285** (1.299)	-5.447** (2.217)	6.672*** (1.493)	1.975 (2.599)	-0.659 (1.397)	3.198** (1.390)
Observasi	4933	4549	4613	4273	4464	4713
Adj R2	0.245	0.151	0.068	0.076	0.282	0.044

Standard errors in parentheses

\*  $p < 0.10$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*\*\*  $p < 0.01$

Berdasarkan hasil regresi di atas, belanja pemerintah pusat di daerah berdasarkan beberapa fungsi yaitu pelayanan umum, ekonomi serta perumahan dan fasilitas umum secara signifikan memiliki korelasi yang positif dengan belanja daerah pada fungsi yang sama. Artinya, belanja pemerintah pusat di daerah untuk ketiga fungsi tersebut dapat menjadi stimulus bagi daerah untuk meningkatkan belanja daerah pada fungsi yang sama. Ketika belanja pemerintah pusat untuk fungsi pelayanan umum, ekonomi serta perumahan dan fasilitas umum meningkat, pemerintah daerah cenderung untuk meningkatkan juga belanja daerah untuk fungsi-fungsi tersebut sebagai respon dari pembangunan atau program yang dilakukan pemerintah pusat di daerahnya.

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa kenaikan 1% belanja pusat fungsi pelayanan umum di kabupaten/kota tertentu berkorelasi dengan kenaikan belanja daerah fungsi pelayanan umum sebesar 0,0589%. Kenaikan sebesar 1% belanja pemerintah pusat fungsi ekonomi di kabupaten/kota tertentu berkorelasi dengan kenaikan belanja daerah fungsi ekonomi sebesar 0,0169%. Selanjutnya untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum, kenaikan belanja pemerintah pusat fungsi perumahan dan fasilitas umum di kabupaten/kota tertentu berkorelasi dengan kenaikan belanja daerah fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar 0,0147%.

Sedangkan belanja pemerintah pusat menurut fungsi lingkungan hidup justru memiliki hubungan yang negatif dengan belanja daerah fungsi lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa untuk fungsi lingkungan hidup terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah cenderung menekan belanja daerah untuk fungsi lingkungan hidup ketika sudah terdapat belanja pemerintah pusat untuk fungsi lingkungan hidup di daerah tersebut. Ketika pemerintah pusat meningkatkan belanja fungsi lingkungan hidup di kabupaten/kota tertentu sebanyak 1%, maka

pemerintah daerah di kabupaten/kota tersebut cenderung menurunkan belanja daerah untuk fungsi lingkungan hidup sebesar 0,06%.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa yaitu pertama bahwa rata-rata belanja daerah dan belanja pemerintah di daerah pada kabupaten/kota di Jawa lebih tinggi dibanding wilayah lain. Total belanja daerah seluruh kabupaten/kota di Jawa mencapai 37% dari total belanja daerah secara nasional. Sedangkan total belanja pemerintah pusat di daerah untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa mencapai 41% dari total secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Jawa memiliki belanja daerah dan belanja pemerintah pusat di daerah yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota di wilayah lain. Kedua, selaras dengan penelitian sebelumnya, pendapatan daerah, transfer dan jumlah penduduk terbukti berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil regresi menunjukkan adanya korelasi positif antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah yang artinya belanja pemerintah pusat di daerah dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia khususnya wilayah Jawa. Ketiga, korelasi antara belanja pusat dan daerah juga ditunjukkan pada analisis hubungan belanja pemerintah pusat dan belanja daerah menurut fungsi, yaitu belanja pemerintah pusat di daerah berdasarkan fungsi pelayanan umum, ekonomi dan perumahan dan fasilitas umum memiliki hubungan positif dengan belanja daerah pada fungsi yang sama.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat direkomendasikan yaitu pertama bahwa perbedaan rata-rata belanja pemerintah baik pusat maupun daerah untuk kabupaten/kota yang cukup tinggi antara wilayah Jawa dan luar Jawa dapat diperkecil dengan stimulus dari pemerintah pusat melalui belanja pemerintah pusat di daerah serta memutakhirkan pengaturan mengenai sistem transfer dan potensi pendapatan asli daerah agar kabupaten/kota khususnya di luar Jawa dapat meningkatkan sumber daya keuangannya. Kedua, pemerintah pusat dapat menggunakan belanja pemerintah pusat di daerah sebagai *instrument* untuk menstimulus belanja daerah dalam meningkatkan pembangunan di daerah, khususnya untuk fungsi pelayanan umum, ekonomi dan perumahan dan fasilitas umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 6(5), 26–30.
- Ahmad, E., Tandberg, E., & Zhang, P. (2002). On National or Supranational Objectives: Improving the Effectiveness of Targeted Expenditure Programs. IMF Working Paper, WP/02/6(June), 555–582.
- Ansori, W., & Muthmainah, M. (2018). Fenomena Flypaper Effect atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 151. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i2.389>
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91. <https://doi.org/10.21002/jepi.v18i1.773>
- Aziza, H. N., & Sumardjo, M. (2020). Analysis of Local Expenditure Determinants in Districts/Cities in the East Java Province. *European Journal of Business and Management Research*, 5(4), 1–4. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.4.439>
- Braun, D., & Guston, D. H. (2003). Principal-agent theory and research policy: An introduction.

- Science and Public Policy*, 30(5), 302–308.  
<https://doi.org/10.3152/147154303781780290>
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214.  
<https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Gennari, E., & Messina, G. (2009). How sticky are local expenditures in Italy? Assessing the relevance of the flypaper effect through municipal data. *ISocieta Italiana Di Economia Pubblica*, 2, 324–344. <https://doi.org/10.1007/s10797-013-9269-9>
- Hofman, B., & Kaiser, K. (2002). The making of the 'big bang' and its aftermath: A political economy perspective. *Georgia State University*, 2001, 15–46.  
<https://doi.org/10.4337/9781845421656.00007>
- Laksono, B. B., & Subowo. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.  
<https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4207>
- Leruth, L. E., & Paul, E. (2007). A Principal-Agent Theory Approach to Public Expenditure Management Systems in Developing Countries. *OECD Journal on Budgeting*, 7(3), 1.  
<https://doi.org/10.5089/9781451864649.001>
- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal-decentralization and economic growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49(1), 1–21. <https://doi.org/10.1086/452488>
- Makorimban, E. Y., Engka, D. S. M., & Rotinsulu, D. C. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(4), 19–35.
- Ramadhan, P. R., Umiyati, E., & Achmad, E. (2021). Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kabupaten Bungo. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 135–146. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i2.13058>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendaptan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76.  
<https://doi.org/10.34209/equ.v21i1.628>
- Williamson, O. E. (2002). The Theory of The Firm as Governance Structure: From Choice to Contract. *Journal of Economic Perspectives*, 16(3), 171–195.  
<https://doi.org/10.1257/089533002760278776>